

Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDes di Desa Oinbit Kecamatan Insana

Diterima:
11 Maret 2024
Revisi:
15 Mei 2024
Terbit:
18 Mei 2024

^{1*}Emanuel Be, ²Kamilaus Konstance Oki, ³Natalia Lily Babulu
¹⁻³Universitas Timor

Abstrak—BUMDes yang dimiliki oleh desa Oinbit sejak didirikan tahun 2017. Sesuai dengan AD/ART BUMDes desa Oinbit, kegiatan awal yang dijalankan oleh BUMDes Oinbit adalah dibidang peternakan, yakni didistribusikannya hewan ternak berupa anakan babi kepada masyarakat yang akan dipelihara selama 1 tahun dan akan dijual kembali pada tahun berikutnya. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk memberikan pelatihan berkaitan dengan penguatan kapasitas dan tata Kelola keuangan BUMDes di Desa Oinbit Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. Peserta pelatihan terdiri dari 20 orang Masyarakat berserta aparat Desa. Tujuan dari pengabdian ini untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat Desa Oinbit Kecamatan Insana terkait dengan penguatan kapasitas dan pengelolaan keuangan BUMDes. Metode kegiatan pengabdian kepada Masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan revitalisasi sesuai kondisi dan tahap perkembangan BUMDes. Hasil pengabdian yang dilakukan Masyarakat khususnya yang terlibat didalam BUMDes lebih memahami berkaitan dengan penguatan kapasitas dan pengelolaan keuangan BUMDes.

Kata Kunci— BUMDes; Keuangan; PKM

Abstract— *BUMDes owned by Oinbit village since its establishment in 2017. In accordance with the OINBIT BUMDES AD/ART, the initial activities carried out by Oinbit BUMDes are in the field of animal husbandry, namely the distribution of livestock in the form of pig saplings to the community which will be raised for 1 year and will be resold the following year. This service activity was carried out to provide training related to strengthening the capacity and financial governance of BUMDes in Oinbit Village, Insana District, North Central Timor Regency. The training participants consisted of 20 community members and village officials. The purpose of this service is to provide understanding to the people of Oinbit Village, Insana District, related to strengthening the capacity and financial management of BUMDes. Methods of community service activities through training, mentoring, and revitalization according to the conditions and stages of development of BUMDes. The results of community service, especially those involved in BUMDes, understand better with regard to strengthening the capacity and financial management of BUMDes.*

Keywords—*BUMDes; Finance; PKM*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

Emanuel Be,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Timor,
Email: emanuelbe936@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Program-program strategis yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga desa telah dimulai dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hadirnya BUMDes di setiap desa diharapkan dapat menopang kegiatan ekonomi desa dan berperan sebagai lembaga sosial dan komersial (Amaral, 2022; Nani et al., 2023). Keberadaan BUMDes merupakan suatu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan atas kebutuhan dan potensi desa yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat desa dan berdampak langsung kepada masyarakat desa itu sendiri (Arfiansyah et al., 2023)

Upaya yang dilakukan pemerintah guna membangun desa telah dilakukan sejak tahun 2015 dengan berupa penganggaran dana desa yang cukup besar. Dana tersebut ditujukan untuk membangun wilayah pedesaan sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat serta kemajuan desa (Kurnia, 2019). Sesuai dengan instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan menyarankan penggunaan dana desa lebih memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa serta tidak mengarahkan pada pembangunan infrastruktur (Tempo, 2019). Perkembangan desa sebagai lembaga, entitas dan komunitas otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri mengalami perubahan yang cepat. Perubahan yang cepat berkaitan dengan desa memberi pandangan baru bahwa desa harus mandiri, berdaya dan memiliki kapasitas untuk mengelola rumah tangga desa sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat desa. Kemandirian desa dapat diukur dari kemampuannya untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa baik dari sisi pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Kondisi ini menuntut desa untuk bisa menggali potensi desa yang bisa menjadi sumber pendapatan asli desa.

Salah satu lembaga yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Permendes Nomor 4 tahun 2015 adalah badan usaha milik desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes menjadi suatu hal yang strategis karena dengan adanya BUMDes, desa bisa mendapatkan alternatif tambahan pembiayaan rumah tangga desa. Di samping itu keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan masyarakat yang memungkinkan masyarakat mampu menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di desa secara optimal. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mendukung pelaksanaan operasional maka BUMDes wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala desa. Anggaran dasar memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDesa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan. Anggaran rumah tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal. Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dilakukan melalui musyawarah desa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan oleh kepala desa.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan meliputi kebutuhan pelatihan apa yang diperlukan, kebutuhan pendampingan dalam hal apa dan revitalisasi aspek apa yang dibutuhkan. Program pengembangan BUMDes tidak hanya selesai pada proses pembentukannya saja namun ada tahapan selanjutnya sebagai rangkaian mekanisme dalam mengembangkan BUMDes menjadi Lembaga Usaha Desa yang mandiri dan profesional sebagai penggerak kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan. Faktor lain yang mendasari perlunya penguatan BUMDes adalah adanya realita bahwa potensi sumberdaya manusia yang sudah terhimpun dalam kelompok-kelompok ekonomi kerap mendapatkan kesulitan ketika ingin mendistribusikan produk lintas daerah. Selain itu diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan fungsi pembinaan, pemantauan dan evaluasi dari pemerintah daerah terhadap pengembangan manajemen dan SDM pengelola BUMDes (Gunawan, 2011).

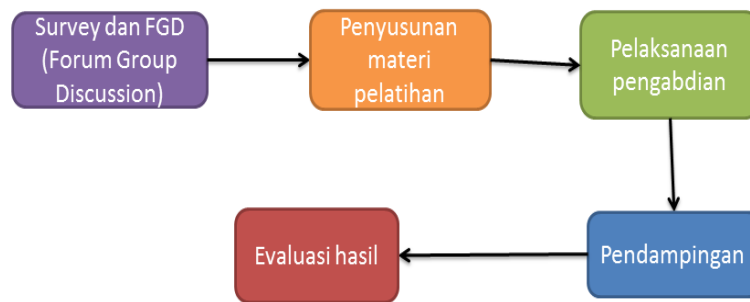
Hal-hal substansif yang menjadi fokus untuk penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes dimulai dengan kebutuhan pelatihan apa sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya, jika BUMDes masih baru maka pelatihan peta jalan BUMDes sangat tepat untuk dilakukan. Untuk kemudian dilanjutkan dengan pelatihan strategi dan manajemen serta pelatihan akuntansi BUMDes sebagai pelengkap. Berkaitan dengan penguatan kelembagaan maka pendampingan BUMDes untuk fase baru atau mulai tepat dilakukan di BUMDes yang mangkrak yang fokus pada pemetaan potensi dan pemilihan usaha yang tepat. Fase menengah berkaitan dengan pendampingan dalam hal strategi dan manajemen untuk BUMDes yang sudah jalan tetapi belum ada keuntungan.

Jika BUMDes sudah jalan dan ingin menjadi maju maka pendampingan berkaitan dengan pengembangan usaha yang sebaiknya dilakukan. Pendampingan yang tepat dengan kondisi BUMDes akan menjadi daya ungkit (*leverage*) yang luar biasa dalam memajukan BUMDes sesuai fase masing-masing. Pemberdayaan BUMDes berkaitan dengan revitalisasi yang bisa dilakukan melalui peningkatan akses agar produk dan pemasaran lebih baik lagi. Teknik yang bisa dilakukan melalui *digital marketing*, integrasi rantai pasok dan kemitraan strategis. Tahap

selanjutnya adalah peningkatan akuntabilitas yang dapat dilakukan dari seting akuntansi sampai dengan pelaporan dengan menggunakan *software* untuk mempercepat proses pelaporan. Tahap inkubasi menjadi revitalisasi puncak dalam pemberdayaan BUMDes yang dapat dilakukan melalui pendampingan secara khusus dan intensif. Tahap inkubasi ini ditujukan agar BUMDes menjadi maju dan besar. Tujuan pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman kepada BUMDes berkaitan dengan penguatan kapasitas dan pengelolaan keuangan BUMDes.

II. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan untuk melakukan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes. Pengabdian akan dilaksanakan di Desa Oinbit Kecamatan Insana. Proses perencanaan serta pelaksanaan akan dilakukan dengan mengacu pada gambar 1 berikut ini



Gambar 1. Proses pelaksanaan pengabdian

Sasaran pengabdian kepada masyarakat adalah BUMDes tetapi melibatkan masyarakat sebagai pelaku dan mitra BUMDes, pemerintah desa, dan pengelola BUMDes menjadi satu kesatuan. Pemerintah desa sebagai salah satu sasaran karena BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes juga berkaitan dengan tatakelola, strategi dan manajemen operasional, pemetaan potensi desa, dan pelaporan keuangan. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi juga menjadi sasaran perbaikan untuk penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes di kegiatan ini yang ditunjukkan pada gambar 2.



Gambar 1. Kegiatan FGD penguatan kapasitas dan tata kelola BUMDes Oinbit

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus pelaksanaan secara garis besar berkaitan dengan beberapa hal tersebut sebagai berikut: Umumnya mayoritas penduduk di Desa Oinbit Kecamatan Insana memiliki mata pencaharian adalah sebagai petani sebab hampir sebagaian wilayah desa Oinbit memiliki potensi terbesar yakni pertanian. Pertanian jagung dan ubi kayu mendominasi hasil panen masyarakat desa Oinbit. Melihat potensi ini maka produksi hasil pertanian adalah peluang terbesar yang bisa dikembangkan melalui BUMDes. Keberadaan BUMDes sangat penting dalam upaya mendorong kemajuan desa menjadi desa mandiri. Jumlah desa mandiri (desa sembada) di Indonesia adalah 174 desa (0,24%), desa maju (desa pra-sembedada) adalah 3.608 desa (5%), desa berkembang (desa madya) sebesar 22.882 desa (31%), desa tertinggal (desa pra-madya) sebesar 33.592 desa (46%), dan desa sangat tertinggal (desa pratama) sebesar 13.453 desa (18%) (Kemendes, 2015). Hal ini berarti bahwa mayoritas desa di Indonesia didominasi oleh desa tertinggal (desa pra-madya), artinya, desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan berkaitan dengan bencana alam, kerentanan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam multi dimensi (Permendes, 2016).

Kondisi BUMDes di Desa Oinbit memiliki masalah sejak awal dibentuk yakni umumnya para penerus BUMDes memiliki keterbatasan pemahaman akan peneglolaan BUMDes tersebut. Pemahaman para pengurus tersebut memiliki asumsi bahwa mengelola BUMDes sama halnya dengan mengelola usaha warung sembako atau usaha bisnis lainnya yang sejenis. Bahkan desa Oinbit sebagai salah satu desa di Kabupaten TTU yang memperoleh bantuan mobil dari direktorat jenderal perhubungan darat Kementerian Perhubungan RI, namun karena keterbatasan tersebut

sehingga mobil tersebut hanya digunakan oleh kepala desa tanpa ada aktifitas yang dapat menopang kegiatan ekonomi di desa.

Selain itu dana pendampingan terhadap BUMDes Oinbit yang dikucurkan dari alokasi dana desa Oinbit sebesar lima puluh juta rupiah (50 juta), di bagi kepada para pebguurus untuk melakukan usaha sendiri-sendiri tanpa ada kemampuan bisnis sama sekali. Ada yang memberi ayam guna menjual lagi kepada konsumen lainnya, ada yang menggunakannya untuk order pulsa telpon dan menjualnya kepada masyarakat serta ada pengurus lainnya yang membeli hewan ternak berupa babi guna penggemukan. Dalam pengelolalaannya, BUMDes desa Oinbit tidak dikelola sesuai tujuan yang tercantum dalam AD/ART BUMDes tersebut.

Selain itu beberapa BUMDes belum memiliki dokumen tata kelola dan praktik bisnis yang sehat. Kondisi ini tidak lepas dari budaya dan karakteristik pemerintah desa yang ikut mempengaruhi perkembangan BUMDes. Masa jabatan dan gaya kepemimpinan kepala desa juga ikut mempengaruhi kemajuan BUMDes. Hal ini disebabkan oleh transisi kepemimpinan dari kepala desa lama ke kepala desa baru yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa. Hasil pemilihan kepala desa memberikan konsekuensi yang luas pada pemerintahan desa serta BUMDes. Kondisi inilah yang secara tidak langsung turut serta mempengaruhi perkembangan dan kemajuan BUMDes. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan untuk melakukan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes. Fokus pelaksanaan secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Penguatan kelembagaan BUMDes Penguatan kelembagaan BUMDesa dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan mengenai pemetaan (mapping), penilaian (assessmen) dan kategorisasi BUMDes sesuai potensi desa. Berkaitan dengan penguatan kelembagaan maka pendampingan BUMDes untuk fase baru atau mulai tepat dilakukan di BUMDes yang mangkrak yang fokus pada pemetaan potensi desa dan pemilihan usaha yang tepat. Fase menengah berkaitan dengan pendampingan dalam hal strategi dan manajemen untuk BUMDes yang sudah jalan tetapi belum memberi keuntungan kepada desa maupun masyarakat pada umumnya. Jika BUMDes sudah jalan dan ingin menjadi maju maka pendampingan berkaitan dengan pengembangan usaha yang sebaiknya dilakukan. Pendampingan yang tepat dengan kondisi BUMDes akan menjadi daya ungkit (*leverage*) yang luar biasa dalam memajukan BUMDes sesuai tahapan/fase masing-masing BUMDes. Penggalan potensi desa ini dimaksudkan agar BUMDes di tiap desa mengetahui kira-kira peluang usaha apa yang menjadi unggulan dari desa. Menggali potensi desa dan masyarakat desa sangat penting untuk memecahkan masalah, salah satunya adalah pengembangan potensi pariwisata alam di desa Oinbit.

Salah satunya adalah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang mengakomodir kepentingan masyarakat berikut hak dan kewajibannya maka masyarakat desa bisa lebih disiplin

dan taat peraturan untuk mengembalikan pinjamannya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung perkembangan BUMDes dalam menjalankan visi dan misinya mewujudkan desa maju dan desa mandiri. Dalam tahap penguatan dan pemberdayaan juga dilakukan pembentukan dan pengembangan jaringan antar BUMDes, sehingga BUMDes yang sudah terbentuk di satu desa bisa menjalin mitra dengan BUMDes lainnya. Seperti membuat sebuah asosiasi BUMDes, sehingga akan memberikan manfaat seperti ikut memperluas pemasaran produk bagi BUMDes. Hal ini juga bisa memberikan wadah untuk komunikasi, saling bertukar pengalaman dan informasi bagi pengurus pengurus BUMDes dan lebih mengkonsistenkan keberadaan BUMDes sebagai lembaga usaha yang ada di desa. Usaha lain yang perlu dilakukan adalah melakukan peningkatan kapasitas pengurus dan karyawan BUMDes dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan atau *capacity building*.

Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan professional. Pelatihan yang diberikan antara lain pelatihan manajemen, keuangan, tata kelola, akuntansi, teknologi informasi dan analisis data. Upaya lain yang bisa dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah melalui *benchmarking* dengan lembaga usaha yang sudah mapan seperti BUMN/BUMD atau swasta yang memiliki bidang usaha sesuai atau sama dengan bidang usaha BUMDes. Selain itu, studi banding ke BUMDes yang sudah berjalan dengan baik juga bisa dilakukan untuk mempercepat proses penguatan kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) BUMDes. Peningkatan kualitas untuk penguatan kelembagaan juga bisa dilakukan melalui penyusunan *standard operating procedures (SOP)* yang berisi seperangkat peraturan proses kerja. Peraturan proses kerja ini berisi langkah-langkah yang harus distandarkan sesuai praktik yang baik dan sehat bagi penguatan kelembagaan BUMDes tersebut. Berkaitan dengan penguatan pengelolaan keuangan BUMDes maka perlu dibuat sistem dan prosedur pengelolaan keuangan BUMDes mencakup alur penganggaran, alur penatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal. Alur penganggaran menjelaskan tentang rencana alokasi anggaran yang akan ditetapkan dalam mendanai belanja operasional BUMDes. Alur penatausahaan menjelaskan tentang alur penerimaan dan pengeluaran yang ada di BUMDes.

Pelaporan menjelaskan tentang laporan yang wajib BUMDes laporkan kepada kepala desa dan masyarakat. Laporan tersebut berupa laporan buku kas umum, arus kas, realisasi anggaran (bulanan) dan laporan keuangan (semesteran/tahunan). Sedangkan pengendalian internal menjelaskan terkait evaluasi kinerja BUMDes dan pertanggungjawaban. Kepala desa menilai kinerja BUMDes dilihat dari hasil laporan keuangan dan realisasi anggaran yang digunakan oleh BUMDes, apakah BUMDes melebihi realisasi anggaran atau tidak. Selanjutnya, kepala desa memberi penilaian apakah ada manfaat yang dirasakan oleh warga sekitar atau tidak dengan adanya kehadiran BUMDes di desa mereka.



Gambar 3. Kegiatan pemetaan, penilaian dan kategorisasi BUMDes sesuai potensi Desa Oinbit

Pemberdayaan BUMDes berkaitan dengan revitalisasi yang bisa dilakukan melalui peningkatan akses agar produk dan pemasaran lebih baik lagi. Teknik yang bisa dilakukan melalui digital marketing, integrasi rantai pasok, dan kemitraan strategis. Pengenalan sosial media untuk marketing produk BUMDes mulai dilakukan. Strategi biaya juga mulai diterapkan melalui upaya-upaya untuk menurunkan biaya produksi dengan melakukan integrasi rantai pemasok. Untuk mendukung perluasan pasar produk maka kemitraan dan kolaborasi secara strategis dengan BUMDes lain atau pihak lainnya sangat penting dilakukan. Peningkatan akuntabilitas adalah tahap pemberdayaan selanjutnya yang dapat dilakukan melalui aplikasi akuntansi dan keuangan sampai dengan pelaporan dengan menggunakan software untuk mempercepat proses pelaporan. Melalui pelaporan keuangan secara cepat dan valid diharapkan dapat membantu BUMDes dalam mengambil keputusan secara strategis dan relevan dengan kebutuhan BUMDes. Pemberdayaan yang optimum adalah pada saat produk BUMDes bisa dikembangkan secara khusus dan intensif melalui pendampingan dari *crowd funding* atau dari lembaga yang kredibel untuk mendorong kemajuan BUMDes.



Gambar 4. Kegiatan evaluasi BUMDes bersama manager dan pengurus BUMDes Oinbit

Meskipun sebagian data telah diperoleh tetapi kebutuhan data yang relevan. Keterbatasan berkaitan dengan akses ke data dan waktu yang tidak bisa dilakukan secara lama di lokasi juga menjadi bahan evaluasi penting dari kegiatan ini. Adanya keterbatasan data tidak membatasi analisis data kegiatan PKM ini karena dokumentasi dan hasil wawancara semi-terstruktur yang diperoleh dari informan kunci mencukupi untuk analisis data secara kualitatif.

IV. KESIMPULAN

Pengembangan Unit Usaha (BUMDes) di Oinbit Kecamatan Insana merupakan komponen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro di wilayah tersebut. Didirikan pada tahun 2014, perusahaan ini kurang dimanfaatkan dan kurang dikembangkan sebagai sebuah bisnis. Proses revitalisasi BUMDes melibatkan fokus pada partisipasi masyarakat dan transparansi. Kapasitas BUMDes masih buruk, dan komisi serta pengurusnya terus melakukan pengembangan untuk meningkatkan aspek manajemen, operasional, dan administrasi. Langkah pertama adalah memberikan pelatihan, pelatihan, dan revitalisasi sesuai dengan kondisi dan tujuan pengembangan BUMDes. Langkah kedua adalah membenahan pengelolaan BUMDes dengan fokus pada pengelolaan yang potensial dan efektif. Langkah ketiga adalah peningkatan kualitas BUMDes dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan penggunaan software. Proses pengembangan BUMDes meliputi peningkatan kapasitas pengelola, peningkatan kualitas organisasi, dan pembuatan standar operasional prosedur (SOP) untuk mencapai tujuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaral, M. A. L. (2022). Pelatihan Keuangan BUMDes: Penyusunan Proposal Usaha Di Kecamatan Kupang Barat. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*, 5(11), 3789–3798
- Anwar, M. S. (2020, Juli 20). Khofifah minta pengelolaan BUMDes di Jatim profesional. *Klik Jatim*. <https://klikjatim.com/>
- Arfiansyah, Z., Qadri, R. A., & Firmansyah, A. (2023). Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes di kabupaten pacitan terkait dengan perencanaan bisnis. *PENGMASKU*, 3(1), 1–7
- Bedwell, W. L., Salas, E., Funke, G. J., & Knott, B. A. (2014). Team workload: A multilevel perspective. *Organizational Psychology Review*, 4(2), 99–123. <https://doi.org/10.1177/2041386613502665>
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448–459.
- Charoensukmongkol, P., & Moqbel, M. (2014). Does Investment in ICT curb or create more corruption? A cross-country analysis. *Public Organization Review*, 14(1), 51–63. <https://doi.org/10.1007/s11115-012-0205-8>
- Rachmat Kriyantono et al. *Abdihaz: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*. 2(2):36-45
- Estrada, L., & Bastida, F. (2020). Effective transparency and institutional trust in Honduran Municipal Governments. *Administration & Society*, 52(6), 890–926.
- Hargie, O. (2016). The importance of communication for organisational effectiveness. In F. Lobo (Ed.), *Psicologia do Trabalho e das Organizações* (hal. 15–32). Axioma.

- Herdiana, D. (2019). Kecenderungan perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11>
- Jatiningrum, C., Fauzi, Irviani, R., Mujiyati, & Hasan, S. (2020). An investigation on the effect of audit committee on financial reporting quality in pre and post IFRS adoption: Evidence from Malaysian companies. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 8 (2), 25–35. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.824>
- Korir, I., & Kipkebut, D. (2016). The effect of reward management on employees commitment in the universities in Nakuru County-Kenya. *Journal of Human Resource Management*, 4(4), 37–48. <https://doi.org/10.11648/j.jhrm.20160404.12>
- Kriyantono, R., Laturakhmi, Y. F., Swastikawara, S., Illahi, A. K., & Ari, D. P. S. (2019). pemberdayaan perangkat desa dalam penyampaian informasi publik untuk mencegah korupsi dalam pelaksanaan program BUMDes di DESA Gendro – Kabupaten Pasuruan. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 4(2), 23–30. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v4i2.3229>
- Lawal, A. I., Oseni, E., Babajide, A. A., Lawal-Adedoyin, B., & Bonetipin, F. (2020). The impact of international financial reporting standard (IFRS) adoption on key financial ratios in Nigeria. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 8(4), 289–300. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8430>
- Nani, P. A., Amaral, M. A. L., Boelan, E. G., Baunsele, A., Alfry Aristo Jansen Sinlae, & Ketmoen, A. (2023). Pelatihan Digital Marketing Dalam Memasarkan Produk Badan Usaha Milik Desa. *Bakti Cendana, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 06(1), 77–84
- Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: extension and test of a three-component conceptualization. *Journal of Applied Psychology*, 78(4), 538–551. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.4.538>
- Rahman, F. (2011). Korupsi di tingkat desa. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, volume 2 (1), 13–24.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54–61. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- Suryani, I. (2018). Factors affecting organizational commitment. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 9(1), 26–34. <https://doi.org/10.24815/JMI.V9I1.11418>
- Tempo. (2019, Maret 6). Mendes Eko Putro: Prioritas dana desa 2019 untuk pemberdayaan ekonomi desa. *Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/1182512/mendes-eko-putro-prioritas-dana-desa-2019-untuk-pemberdayaan-ekonomi-desa/full&view=ok>
- Zubair, F., Bakti, I., & Yustikasari, Y. (2019). Pemberdayaan Perangkat Desa Terampil Bermedia dalam Membangun Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat terhadap Lingkungan di Desa Cikeruh Kecamatan Jatininggor Kabupaten Sumedang. *Abdihaz: Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat*, 1(2), 66-73. <https://doi.org/10.32663/abdihaz.v1i2.955>